

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id



Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

Catatan:

Atas Nama : MOHAMMAD ZULKIFLI LUBIS

NIK : 9171032106890004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 20 Januari 2026

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

Komisi Pemberantasan Korupsi





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD ZULKIFLI LUBIS
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 690274

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000
1. MOBIL, DAHATSU XENIA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 88.692
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 110.088.692

III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (III-III) Rp. 110.088.692

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



ahmad zulkhairun lubis <kiffi.win@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>

9 February 2026 at 09:50

To: kiffi.win@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak



Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 | informasi@pajak.go.id | pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	:	BPE-18684/CT/KPP.1804/2026
Tanggal	:	09 Februari 2026
NPWP	:	9171032106890004
Nama Wajib Pajak	:	MOHAMMAD ZULKIFLI LUBIS
Jenis SPT	:	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	:	2025
Masa Pajak	:	Januari - Desember 2025
Status SPT	:	Normal
Saluran	:	Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	:	09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.